



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. pengkajian tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Menurut Apriani, (2019), memaparkan bahwa data Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan luasan kumuh perkotaan sebesar 8 persen atau 3.140 Ha yang semula luas kumuh di Indonesia seluas 38.431 Ha pada tahun 2014. Salah satu kota di Indonesia yang tidak luput dari permasalahan permukiman kumuh adalah kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibukota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang mengatakan dari data tahun 2014 kawasan kumuh di kota Palembang seluas 2.440 Ha. Angka kawasan kumuh pun sudah berkurang hingga 50% di tahun 2018, yaitu tersisa 1.437 Ha, namun sumbangan terbanyak didaerah Seberang Ulu.

Istilah permukiman kumuh juga didefinisikan sebagai kumpulan permukiman yang memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut (Soeki (1993) dalam (Rindarjono M. G., 2012) :

1. Tingginya tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.250 jiwa/Ha.
2. Kepadatan bangunan yang mencapai 250 rumah atau lebih per hektarnya.
3. Ukuran bangunan yang cenderung kecil, sekitar 25 m<sup>2</sup> atau kurang .
4. Tata letak bangunan yang tidak teratur.



##### 5. Sanitasi yang jelek serta kualitas bangunan yang jelek.

Menurut Apriani, (2019), menyatakan bahwa permasalahan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut secara tepat, cepat, efektif dan efisien. Dalam mengatasi masalah permukiman kumuh, Pemerintah Kota Palembang telah berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta menurunkan tingkat kekumuhan salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku sendiri merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memosisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program yang telah dilakukan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan atau perubahan yang besar dalam mengurangi luasan kumuh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan Pemkot Palembang Tahun 2018 luasan daerah kumuh sebesar 419,07 Ha dari sebelumnya 1.325,46 Ha dan tersisa 906,40 Ha dalam kurun waktu 4 tahun yang berarti luasan daerah kumuh hanya berkurang sekitar 30%. Pemkot menjelaskan bahwa daerah banyak permukiman kumuh adalah di kawasan pinggirang sungai musu, karena daerah pinggirang sungai musu terikat erat dengan sanitasi, prasarana jalannya, drainase dan persoalan lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang tersebut belum berhasil memberantas kekumuhan yang ada, ini disebabkan karena kurangnya memahami permasalahan yang ada sebagai karakteristik pembentuk kekumuhan.



Untuk itu perlu dirumuskan penanganan permukiman kumuh yang tepat sesuai dengan masalah utama yang ada pada kawasan permukiman kumuh melalui penentuan prioritas penanganan lingkungan permukiman kumuh, sehingga perlu disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga penanganan kawasan permukiman kumuh tepat sasaran dan dapat mengurangi permasalahan sesuai kebutuhan penanganan prioritas agar tercipta permukiman yang layak, sehat, nyaman dan teratur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan pembuatan aplikasi yang memudahkan upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menentukan Permukiman Kumuh.

Adapun judul yang diajukan penulis dalam laporan ini yaitu **“Aplikasi Survey Wilayah Penentu Pemukiman Kumuh Kota Palembang menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berbasis *Website*”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Belum adanya aplikasi survey yang memudahkan pemerintah dalam menentukan wilayah permukiman kumuh di Kota Palembang.
2. Proses penentuan prioritas permukiman kumuh sering kali tidak tepat sasaran karena kurangnya pemahaman mengenai karakteristik pembentuk kekumuhan.

Dari kedua masalah di atas dapat dirumuskan menjadi satu masalah yang akan dibahas yaitu **“Bagaimana Membangun Aplikasi Survey Wilayah Penentu Pemukiman Kumuh Kota Palembang menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berbasis *Website*?”**.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas agar mendapatkan penulisan Tugas Akhir dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, dan

---



analisis yang lebih terfokus. Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Sistem Pendukung Keputusan ini membahas tentang Survey Wilayah Penentu Data Pemukiman Kumuh (seperti kepadatan bangunan, ketidakteraturan bangunan, kondisi bangunan tidak layak huni, dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dll) di Kota Palembang.
2. Sistem yang dibuat hanya digunakan untuk internal, yaitu Admin, Bagian Pengawas Lapangan dan Kepala Bagian Pengelola Pemukiman Kumuh.
3. Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* berbasis *Website*.
4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai basis data.
5. Sistem Pendukung Keputusan ini dilengkapi dengan form input, pencarian, edit serta print data hasil penilaian.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

##### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Membangun suatu Sistem Aplikasi Survey Wilayah Penentu Pemukiman Kumuh yang berguna untuk mengatasi permasalahan yang ada;
2. Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah guna menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

##### **1.4.2 Manfaat**

Adapun manfaat yang didapat dalam pembuatan aplikasi ini adalah :

1. Diharapkan perancangan Aplikasi Survey Wilayah Penentu Pemukiman Kumuh Kota Palembang menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* berbasis *Website* yang lebih cepat, tepat, dan akurat dalam melakukan proses Penentu Permukiman Kumuh Kota Palembang;
  2. Sebagai sarana untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan menerapkan ilmu komputer khususnya dalam menggunakan Pemrograman berbasis Web selama di Politeknik Negeri Sriwijaya;
-



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Pembahasan berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan ditulis satu paragraf per bab buku. Satu paragraf berisi minimal tiga kalimat. Berdasarkan penjelasan diatas agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Tugas Akhir ini, maka Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini secara umum berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca laporan tugas akhir secara keseluruhan. Bab pendahuluan ini terdiri atas : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi tentang teori yang terkait langsung diberikan secukupnya, sekedar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca yang kurang familiar dengan topik tugas akhir agar dapat mengerti isi bab-bab selanjutnya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan instansi tempat mahasiswa tugas akhir, metode yang akan digunakan dan konsep solusi yang ditawarkan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan deskripsi hasil spesifikasi perangkat lunak yang akan dibuat, deskripsi rancangan perangkat lunak yang akan dibuat dan deskripsi perangkat lunak yang akan dibuat. Serta pembahasan untuk menunjukkan seberapa jauh solusi yang diuraikan pada bagian sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan utama tugas akhir.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan ketercapaian tujuan tugas akhir dengan



permasalahan yang diselesaikan dalam tugas akhir serta saran yang berisi kajian hal-hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut.